

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dampaknya lebih besar peranannya bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa industri perbankan merupakan sektor yang paling penting dalam perekonomian setiap Negara.

Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam dunia perbankan disebut *funding* dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman ( *lending* ). Pada dasarnya bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam proses ini dana yang terkumpul dari masyarakat disalurkan dalam berbagai macam fasilitas kredit.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) memiliki tiga fungsi umum yaitu : (Rekso Prayitno, 1995 : 5)

1. Memasok dan pinjaman yang bonafid
2. Mengurangi resiko bagi para pemilik dana yang menginginkan kelebihan dana yang dimilikinya dapat ikut diputar dalam kegiatan usaha.
3. Meningkatkan likuiditas perekonomian tanpa mengurangi jaminan likuiditas para pemilik surat tagihan.

Mengingat arti penting industri perbankan dalam perekonomian Negara, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu mendorong sektor perbankan ini. Deregulasi 1 Juni 1983 dikeluarkan dengan latar belakang

posisi keuangan pemerintah tidak dapat secara terus-menerus mendukung pola subsidi dan memasok kredit likuiditas murah keberbagai lapisan usaha. Sasaran yang ingin dicapai dapat dijabarkan kedalam tiga pilar besar, yaitu : (Infobank, 1988 : 7)

1. Menggalakkan mobilisasi dana masyarakat, baik dibidang penghimpunan dana maupun dibidang penyaluran kredit.
2. Memurnikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral.
3. Menggalakkan efisiensi dan profesionalisme didunia perbankan.

Sejak adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai deregulasi kegiatan perbankan, sangat dirasakan adanya persaingan yang semakin tajam dalam dunia perbankan maupun didalam lembaga-lembaga keuangan non bank di Indonesia. Sudah jelas dari adanya posisi dan kondisi yang sudah berubah dari tahun ketahun, maka para banker di Indonesia memperoleh tantangan yang lebih berat dalam mengelola masing-masing bank agar tetap dapat bertahan dan dapat mengembangkam bank yang dikelolanya semaksimal mungkin.

Terpuruknya perekonomian Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997 lalu memang masih terasa dampaknya hingga sekarang, meskipun masyarakat sendiri tampaknya sudah mulai terbiasa. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah yang sulit untuk dikendalikan hingga menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan juga bukan merupakan hal baru lagi bagi masyarakat kita. Kondisi yang ada saat ini kian memanas karna didukung oleh situasi politik serta munculnya isu bahkan aksi

Bagi para pelaku ekonomi, kondisi Negara yang kurang menguntungkan ini menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap kelangsungan usahanya. Banyak infestor yang membatasi investasinya bahkan urung untuk menanamkan modalnya didalam negri karna kurang terjaminnya tingkat keuntungan yang diharapkan dimasa mendatang. Kondisai Negara yang seperti pula memiliki pengaruh yang buruk terhadap kinerja perusahaan.

Dana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jalannya usaha bagi perusahaan. Tentunya menjadi penting keberadaan suatu lembaga keuangan untuk dapat menyediakan modal bagi perusahaan. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyalur dana dalam bentuk pemberian kredit bagi pengusaha maupun masyarakat yang berkepentingan. Sehingga perbankan di Indonesia memegang peranan penting dalam usaha pengembangan di sektor ekonomi.

Dengan adanya fakto 1998 atau dikenal dengan paket 27 oktober maka periode tersebut semakin marak, dalam penghimpun dana masyarakat terutama produk tabungan, sehingga terjadi persaingan bisnis yang semakin ketat. Kemudahan membuka bank swasta baru yang ditutup sejak tahun 1973 atau menambah kantor cabang menyebabkan bank tumbuh subur bagaikan jamur yang tumbuh pada musim hujan.

Tujuan utama dari deregulasi PAKTO tersebut adalah untuk menggerakkan iklim usaha dan investasi. Dengan jumlah bank yang lebih banyak dan apalagi dengan *reserve requirement* yang hanya 2% diharapkan alternatif pembiayaan akan semakin banyak dan kompetitif. Sayangnya tujuan yang baik itu kemudian menjadi buru-buru bagi dunia perbankan secara nasional. Selain dengan

bertambahnya jumlah bank yang ada di negara kita justru bertambah pula masalah perbankan nasional. PAKTO hanya merupakan faktor eksternal sebagai pemicu bertambahnya jumlah bank, namun faktor internal seperti sistem pengelolaan manajemen yang keliru yang tidak efisien bank itu sendiri juga menjadi salah satu penyebab pengaruh perkembangan perbankan.

Dengan adanya kegiatan industri perbankan yang meningkat pesat yang penuh persaingan, sehingga pemerintah mengambil tindakan penyesuaian dari otoritas moneter. Sebagai *follow up* dari kebijakan deregulasi perbankan juni 1993. Sumarlin dikeluarkan kebijakan paket oktober 1990, tetapi kemudian diresmikan lagi dengan kebijakan paket februari 1991, terkenal dengan paktri, dimana industri perbankan diminta untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan sebagai bank yang sehat.

Bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. Kesiapan memenuhi kewajiban setiap saat ini, menjadi semakin penting artinya mengingat peranan bank sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. sehingga transaksi dapat berjalan dengan baik.

Pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan

surat-surat berharga. Sehingga pengelola bank akan mampu melihat kedepan dan ikut serta dalam pengembangan ekonomi negaranya. Tingkat kesehatan bank bisa digunakan sebagai salah satu pemantau kebijakan bank sentral terhadap bank umum.

Pada akhir 2001 Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia (PBI) terbaru. Bank Indonesia (BI) telah mewajibkan bank-bank dalam pengawasannya untuk memberikan laporan keuangan setiap bulan selama triwulan dan tahunan, untuk dipublikasikan.

Pokok-pokok PBI baru adalah :

1. Bank-bank harus mengumumkan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, dan tahunan disertai laporan konsolidasi keuangan yang terkait dengan kelompok usahanya.
2. Untuk mempertahankan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8 %, maka setiap bank dilarang mendistribusikan modal atau labanya diantara pembayaran deviden, pembayaran bonus.
3. Pajak tangguhan harus dikeluarkan dari perhitungan laba rugi.
4. Selain sanksi penurunan tingkat kesehatan bank, maka bank yang tidak dapat memenuhi CAR 8 % akan diproses melalui *Capital Restoration Plan*.

Bank Indonesia melarang bank-bank untuk mendistribusikan modal atau labanya yang menyebabkan kondisi permodalannya tidak mencapai CAR 8 % distribusi modal ini dapat dibuat secara degradasi karena tidak semua bank-bank di Indonesia masuk klasifikasi Bank Internasional.

menimbulkan kesadaran berusaha dan disiplin pengawasan maka CAR 8 % ini layak diterapkan.

Laporan keuangan menjadi sangat penting karena mengandung informasi yang penting bagi sejumlah besar pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi, terutama bagi perusahaan yang sudah *go public* dan memasuki pasar modal. Untuk itu laporan keuangan yang diharapkan adalah yang mampu memberikan gambaran keadaan perusahaan tersebut secara wajar. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat juga perlu untuk menyampaikan laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai keadaan bank tersebut secara wajar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Kinerja Perbankan Swasta Nasional yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta Tahun 2000-2004”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Untuk membatasi perluasan masalah maka penulis membatasi pada :

1. Analisis kebangkrutan Perbankan swasta nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta pada periode 2000-2004 dengan metode diskriminan Altman yaitu suatu teknik analisis yang mengkombinasikan berbagai rasio keuangan ke dalam suatu model untuk memprediksi apakah suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tidak.
2. Periode penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2000 – 2004.
3. Obyek penelitian adalah Perbankan swasta nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta pada periode 2000-2004 yang terdiri dari :

- a. P.T Bank Arta Niaga Kencana Tbk.
- b. P.T Bank Central Asia Tbk.
- c. P.T Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
- d. P.T Bank CIC International Tbk.
- e. P.T Bank Danamon Indonesia Tbk.
- f. P.T Bank Danpac Tbk.
- g. P.T Bank Eksekutif International Tbk.
- h. P.T Bank Niaga Tbk.
- i. P.T Bank International Indonesia Tbk.
- j. P.T Bank Permata Tbk.
- k. P.T Bank Victoria International Tbk.
- l. P.T Inter-Pacific Bank Tbk.
- m. P.T Bank Lippo Tbk.
- n. P.T Bank Mayapada Tbk.
- o. P.T Bank Mega Tbk.
- p. P.T Bank NISP Tbk.
- q. P.T Bank Pan Indonesia Tbk.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Apakah kinerja Perbankan swasta nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta masuk dalam kondisi sehat, grey, atau berada pada posisi

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kinerja perbankan dalam menjalankan kegiatan perbankan menurut model Altman, selama 5 periode dimulai dari tahun 2000 hingga 2004 pada perbankan swasta nasional.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Sebagai suatu usaha untuk mengaplikasikan teori, memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan, selanjutnya mengetahui kondisi suatu perbankan.

##### **2. Bagi perbankan.**

Dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang dialami perbankan serta kinerja perbankan, sehingga perbankan dapat mengantisipasi kemungkinan yang mungkin terjadi.

##### **3. Bagi Dunia Pendidikan**

Sebagai suatu usaha untuk mengaplikasikan teori, memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan, selanjutnya mengetahui kondisi suatu perbankan.